



Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari

Analysis of Social Problems on the Impact of Losari Beach Reclamation

Rd Muhammad Alfani¹, Kurniyati Lukman², Tri Handoyo³, Bahrum Mulki Ernas⁴

¹Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Kabupaten
Barru.
Email: muhammadalfanh10@gmail.com

²Dinas Pertanian, Kabupaten
Barru.
Email: kurniyati.lukman@gmail.com

³Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat RI.
Email: tri.handoyo@pu.go.id

⁴Kementrian Agama RI.
Email: mulkiernas94@gmail.com

Keywords: Social Problem,
Coastal Reclamation, Makassar

Kata kunci: Masalah Sosial,
Reklamasi Pantai, Makassar

Abstract

Coastal reclamation is an example of human efforts to address the limitations of land in urban areas along with the increasing need for space due to population enhancement and various activities. In addition to the benefits it generates, the reclamation process often not going well due to various problems including in social aspect. Currently, reclamation has been carried out in several parts of Indonesia, and one that is interesting to note is what happened in Makassar, namely Center Point of Indonesia in the Losari Beach. This study aims to analyze social problems (positive and negative impacts, social compensation, and formulate recommendations policy). The analytical approach in this study using a conflict analysis approach, that is seeing a society made up of different groups competing for control of strategic resources, such as power, finance, and authority to impose a value on society. Policy recommendations basically produced for the beneficiaries, such as fishermen, transport workers, fishpond farmers, banana sellers, micro business, and housewives who also affected. The policies formulated as follows: a) increasing people's income; b) community capacity building; b) fulfillment of basic rights; c) community empowerment; and e) strengthening the home-based creative industry network.

Abstrak

Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan seiring terus bertambahnya kebutuhan akan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk dan beragam aktivitas. Selain manfaat yang dihasilkan, proses reklamasi pun sering kali belum berjalan dengan baik karena menimbulkan berbagai masalah termasuk masalah sosial. Saat ini, reklamasi telah dilakukan di beberapa wilayah Indonesia, dan salah satu reklamasi yang menarik untuk diperhatikan adalah yang terjadi di Kota Makassar, yaitu pembangunan Center Point of Indonesia di Kawasan Pantai Losari. Kajian Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari ini dimaksudkan

untuk menganalisis masalah sosial (dampak positif, dampak negatif, prospek layanan publik, kompensasi sosial) dan merumuskan rekomendasi kebijakan/rencana sosial guna mengoptimalkan reklamasi yang dilaksanakan. Pendekatan analisis dalam masalah sosial pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis konflik, yaitu melihat masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok yang berbeda yang berkompetisi untuk menguasai sumberdaya strategis, seperti kekuasaan, finansial, dan otoritas untuk memaksakan sebuah nilai pada masyarakat. Rekomendasi arah kebijakan yang dihasilkan difokuskan untuk kelompok sasaran penerima manfaat, yaitu masyarakat terdampak (nelayan, buruh angkut, petani tambak, penjual pisang epe, pelaku UMKM) dan para ibu rumah tangga yang juga terdampak dari pembangunan CPI. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut: a) peningkatan pendapatan masyarakat terdampak; b) peningkatan kapasitas masyarakat terdampak; b) pemenuhan hak - hak dasar masyarakat terdampak; c) pemberdayaan masyarakat terdampak; dan e) penguatan jaringan industri kreatif rumahan.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam aktivitas ini sering dilakukan perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberi pengaruh pada lingkungan hidup. Di daerah perkotaan persoalan lingkungan yang paling nampak adalah persoalan yang ditimbulkan oleh penggunaan lahan. Ada tiga penyebab utama antara lain; (1) faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk baik secara alami (kelahiran) maupun perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), (2) faktor pembangunan yang senantiasa mendominasi daerah perkotaan, (3) faktor keterbatasan lahan perkotaan.

Masalah penggunaan lahan di Kota Makassar juga mulai dirasakan, hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk setiap tahun terjadi peningkatan yang diiringi dengan perkembangan kegiatan usaha yang ada didalamnya. Seperti yang kita ketahui dampak dari kepadatan penduduk yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan dampak sosial yang berkelanjutan.

Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan, sebagaimana yang terjadi di Kota Makassar kegiatan reklamasi yang dilakukan adalah Pembangunan Center Point of Indonesia di Kawasan Pantai Losari. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034, ditetapkan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) sebagai Pusat Global Bisnis Terpadu. Pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI) dibangun di kawasan dengan luas total 600 hektar, terdiri dari pusat

bisnis dan pemerintahan, kawasan liburan, hotel-hotel kelas dunia yang dilengkapi dengan lapangan golf dengan view ke laut lepas dan pemandangan ke pulau di Teluk Makassar. Dalam perkembangan selanjutnya kawasan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas perkotaan dan permukiman. Proses reklamasi pantai pada kenyataannya belum berjalan dengan baik sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif seperti semakin banyaknya material yang hanyut, sehingga terjadi pendangkalan perairan, dan bila ini terus berlangsung akan mengancam ekosistem pantai. Resiko ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan kesimpulan bahwa reklamasi di Kawasan Pantai Losari menimbulkan dampak pencemaran yang disebabkan oleh sampah yang dibuang di sembarang tempat dan yang melakukan hal tersebut tidak lain adalah para pengunjung dan para pedagang serta karena limbah dari perhotelan, perumahan hingga dampak dari reklamasi CPI (Fuadi, 2021). Dengan mengetahui dampak lingkungan yang terjadi pasca reklamasi, maka dalam penelitian ini akan mengambil lokus dampak sosial yang terjadi akibat pembangunan CPI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Analisis Masalah Sosial

Pendekatan analisis dalam masalah sosial pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) yang dilakukan melalui reklamasi Pantai Teluk Makassar menggunakan pendekatan analisis konflik karena masyarakat terdiri atas berbagai kelompok yang berbeda yang berkompetisi untuk menguasai sumberdaya strategis, seperti kekuasaan, finansial, dan otoritas untuk memaksakan sebuah nilai pada masyarakat.

Konflik merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia, ketika berinteraksi, berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam berbagai kondisi dan peristiwa. Analisis konflik dalam konteks pembangunan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menelaah, menemukan dan memformulasikan kondisi masyarakat secara komprehensif dalam kerangka program pembangunan mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Adapun Analisis Pembangunan CPI berdasarkan pendekatan analisis konflik di Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Analisis Pembangunan CPI Berdasarkan Analisis Konflik

Pendekatan Analisis Konflik	
Konsep Dasar	Pembangunan CPI berdampak positif kepada pelaku bisnis tetapi berdampak negatif terhadap masyarakat pesisir di sekitar.

Pendekatan Analisis Konflik

Permasalahan Sosial	Masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan, buruh angkut, petani tambak, penjual pisang epe, pelaku UMKM di wilayah Pantai Losari mengalami pengurangan pendapatan penghasilan.
Perubahan Sosial	Dampak dari CPI bisa menghilangkan pekerjaan masyarakat pesisir yang berakibat pada mata pencaharian yang berkurang dan keterpenuhan hak-hak dasar mereka yang sulit terpenuhi.
Individu	Masyarakat tidak memiliki pekerjaan akibat dari pembangunan CPI yang berdampak pada kemiskinan dan pengangguran untuk masyarakat yang terdampak.
Masyarakat	Semakin menambah kesenjangan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah.

Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Attahmid (2018) dengan mengidentifikasi lima faktor perubahan masyarakat pesisir sebagai dampak pembangun CPI Makassar. Pertama, masyarakat pesisir mengalami perubahan dalam hal penurunan perolehan hasil-hasil laut yang disebabkan oleh lahan penangkapan ikan dan kerang-kerang yang ada menjadi kurang produktif sehingga sulit untuk mendapatkan hasil laut seperti dahulu lagi. Kedua, Masyarakat pesisir mengalami perubahan penurunan dalam penghasilan yang disebabkan oleh adanya penurunan hasil laut yang diperoleh sehingga masyarakat pesisir harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapat ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Ketiga, masyarakat pesisir mengalami perubahan dalam hal status pekerjaan yang beralih profesi ke pekerjaan lain yang bukan nelayan yang disebabkan oleh penurunan jumlah penghasilan dari pekerjaan sebagai nelayan sehingga masyarakat pesisir memilih untuk mencari pekerjaan lain. Keempat, masyarakat pesisir mengalami perpindahan wilayah penangkapan hasil laut karena sulitnya mendapatkan hasil laut karena wilayah yang dahulu kini menjadi lahan yang ditimbuni untuk pembangunan CPI. Kelima, masyarakat pesisir yang memiliki usia yang tua, tidak memiliki modal dan latar belakang pendidikan yang rendah menyebabkan beberapa masyarakat pesisir tetap bertahan sebagai nelayan.

Analisis Masalah Sosial

Analisis sosial pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) yang dilakukan melalui reklamasi pantai Teluk Makassar dijelaskan dengan menguraikan dampak positif, dampak negatif, prospek layanan publik, dan kompensasi sosial dalam perspektif ekonomi.

a. Dampak Positif

Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Makassar dan Sulawesi Selatan. Pembangunan ini pun diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Wilayah Barat Indonesia (WBI) dan Wilayah Timur Indonesia (WTI) dimana per Triwulan II 2021 kontribusi PDB Nasional masih didominasi Pulau Jawa sebesar 57,92% dan Pulau Sumatera sebesar 21,73% (BPS, 2021). Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diwujudkan di antaranya dengan berbagai potensi ekonomi yang akan dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

1. Berkembangnya Sektor Bisnis dan Hiburan

Center Point of Indonesia (CPI) dibangun dengan berbagai fasilitas, dimana persentase paling besar adalah pusat bisnis seluas 32,9 ha (21%) dan berbagai pusat hiburan. Adanya pusat bisnis dan pusat hiburan baru ini tentu akan membuat perputaran uang semakin tinggi yang akan memberikan multiplier effect besar dalam roda perekonomian. Adapun lapangan usaha yang akan paling terdampak diperkirakan adalah sektor tersier, meliputi perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, dan jasa perusahaan.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan PAD (Kab/Kota di Metropolitan Mamminasata dan Provinsi Sulawesi Selatan) disebabkan adanya sumber pajak dan retribusi baru dari berbagai kegiatan ekonomi di Center Point of Indonesia (CPI) dan kawasan sekitarnya. Peningkatan PAD ini kemudian akan meningkatkan indeks kapasitas fiskal daerah, sehingga daerah akan semakin mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Berkurangnya proporsi APBN dalam pembangunan di wilayah Makassar dan sekitarnya akan berdampak luas karena APBN menjadi dapat lebih banyak digunakan di wilayah lainnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

3. Bertambahnya Lapangan Kerja

Lapangan kerja dapat meningkat saat pelaksanaan pembangunan maupun setelah pembangunan selesai. Saat pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja konstruksi. Tenaga kerja konstruksi yang tidak memerlukan keahlian khusus sebaiknya diambil dari penduduk lokal yang usahanya terganggu oleh pembangunan (nelayan, petani tambak, buruh, dsb). Setelah pembangunan selesai, tenaga kerja yang diperlukan akan lebih beragam, terutama terkait sektor perdagangan dan jasa. Masyarakat terdampak yang dipekerjakan sebagai tenaga konstruksi saat pembangunan CPI harus tetap dapat diakomodir setelah CPI beroperasi. Oleh sebab itu, selain pelatihan konstruksi

diperlukan juga pelatihan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi yang berkembang di CPI.

4. Peningkatan Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata akan turut berkembang dengan adanya Center Point of Indonesia (CPI), khususnya wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Berkembangnya wisata MICE akan memberikan multiplier effect besar karena semakin banyaknya uang yang dibelanjakan oleh wisatawan akan mendorong peningkatan berbagai sektor produksi. Dalam rangka mengoptimalkan potensi ini, diharapkan ada kebijakan yang mendukung masyarakat agar dapat mengembangkan kegiatan usaha pendukung pariwisata.

5. Berkurangnya Risiko Tsunami

Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) dapat berfungsi sebagai peredam tsunami. Hal ini karena proses reklamasi Teluk Makassar disertai dengan pemasangan front break water, sehingga akan meminimalkan kerusakan jika terjadi tsunami. Front break water bekerja dengan melemahkan kekuatan gelombang yang datang. Dengan demikian, risiko tsunami dapat berkurang sehingga Kota Makassar dapat menjadi tempat yang lebih aman dalam berkegiatan, terutama untuk pengembangan ekonomi.

6. Menarik Investor

Multiplier effect pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) mengakibatkan peningkatan produksi di berbagai sektor ekonomi. Peningkatan tersebut merupakan bentuk pemenuhan demand yang muncul. Hal ini tentu merupakan peluang besar, terutama jika sisi supply belum mampu memenuhi peningkatan kebutuhan baik selama proses pembangunan maupun setelah CPI beroperasi. Urbanisasi pun akan semakin cepat dan semakin meluas. Urbanisasi terjadi akibat fungsi CPI yang memperkuat pull factor Kota Makassar. Hal ini tentu akan menarik beragam investasi untuk masuk, mengingat adanya hubungan positif antara urbanisasi dengan peningkatan demand.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) berdasarkan aspek sosial dan perspektif ekonomi secara umum adalah menurunnya tingkat perekonomian masyarakat di sekitar kawasan pembangunan (kawasan pesisir) akibat mata pencahariannya terganggu oleh aktivitas pembangunan. Akibatnya, mereka semakin terperangkap dalam kelas sosial yang rendah. Secara lebih rinci, dampak negatif pembangunan CPI adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) terlihat ketika masyarakat berpenghasilan menengah ke atas sebagai sasaran utama pembangunan CPI akan dapat mengakses berbagai fasilitas di dalamnya, tetapi masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak akan kesulitan mengaksesnya. Kesenjangan terjadi antara pelaku sektor jasa perdagangan yang akan semakin berkembang dengan profesi nelayan dan petani tambak yang justru tertekan dengan adanya CPI. Tertekannya profesi nelayan dan petani tambak karena adanya perubahan ekosistem pesisir seperti lokasi tangkapan ikan akan semakin jauh, adanya risiko pencemaran air, dsb. Meningkatnya kesenjangan ini membuat risiko konflik sosial semakin tinggi.

2. Tertekannya Profesi Nelayan

Meningkatnya pencemaran pantai pada saat pembangunan ataupun ketika Center Point of Indonesia (CPI) beroperasi akan menurunkan hasil laut. Masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapat ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Hal ini karena alur tangkap ikan berpindah menjadi lebih jauh.

3. Menurunnya Kualitas Hidup (Sandang, Pangan, Papan) Nelayan

Penurunan kualitas hidup nelayan merupakan dampak sosial lanjutan dari menurunnya tingkat perekonomian mereka. Nelayan akan semakin sulit mengakses kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Jika kondisi ini dibiarkan maka kesenjangan akan semakin meningkat dan dapat berujung pada konflik sosial. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuat kebijakan dalam hal ini kompensasi untuk para nelayan terdampak.

c. Prospek Layanan Publik

Layanan publik yang perlu dikembangkan dalam mendukung Center Point of Indonesia (CPI) dari perspektif ekonomi meliputi: 1) Tersedianya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas perekonomian, khususnya untuk membangun kawasan strategi bisnis global; 2) Penyediaan sarana prasarana bagi pelaku usaha untuk pemasaran produk; dan 3) Kemudahan izin usaha untuk investor. Layanan publik tersebut dirumuskan untuk mengoptimalkan dampak positif yang akan dihasilkan dari pembangunan CPI. Layanan publik tersebut selain mendukung investor juga perlu mendukung pengembangan masyarakat lokal. Pelaku usaha perlu diarahkan untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan bisnisnya.

d. Kompensasi Sosial

Berdasarkan Keputusan Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Relokasi dan Kompensasi Kegiatan Reklamasi di

Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, kompensasi adalah penggantian yang diberikan atas tanah, bangunan, dan usaha yang dibebaskan, secara keseluruhan atau sebagian dan semua aset/benda yang tidak bergerak di atas tanah dan bangunan-bangunan tersebut seperti tanaman dan pohon serta aset non-fisik (kesempatan yang hilang akibat dampak reklamasi) seperti hilangnya kesempatan berusaha, dan menurunnya tingkat pendapatan. Bentuk kompensasi dapat berupa ganti kerugian tunai maupun non tunai. Pada subbab ini, kompensasi yang akan didalami lebih lanjut adalah kompensasi dalam rangka pemulihan pendapatan masyarakat terdampak dalam bentuk non tunai.

Tujuan utama pemberian kompensasi adalah untuk menghindari konflik sosial akibat adanya kerugian yang diterima masyarakat yang tidak disepakati penyelesaiannya. Oleh sebab itu, selaras dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari Center Point of Indonesia (CPI) terhadap masyarakat sekitar, bentuk kompensasi yang diperlukan adalah terkait upaya menjaga bahkan meningkatkan perekonomian masyarakat terdampak baik saat pelaksanaan pembangunan maupun saat CPI sudah beroperasi. Bentuk kompensasi dimaksud antara lain: 1) pelatihan keterampilan; 2) pemberian bantuan modal untuk membuka usaha; 3) penyediaan lapangan pekerjaan di CPI bagi masyarakat terdampak; 4) pemenuhan hak – hak dasar (sandang, pangan, papan); dan 5) penyediaan sarana prasarana industri kreatif rumah tangga.

Rekomendasi Rencana Sosial

Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) di pesisir pantai Kota Makassar memberikan dampak sosial terutama bagi masyarakat pesisir. Bagi masyarakat pesisir keberadaan CPI ini memberikan dampak negatif dengan hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir (nelayan, buruh angkut, petani tambak, penjual pisang epe, pelaku UMKM) di sekitar pembangunan CPI sehingga menurunkan pendapatan dan meningkatkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, perencanaan sosial diperlukan untuk membantu memberikan pelayanan publik dan kompensasi sosial kepada masyarakat terdampak agar bisa mengembalikan kembali kesejahteraan masyarakat terdampak tersebut.

a. Masalah Sosial Ekonomi Pembangunan CPI

Masalah sosial ekonomi menjadi masalah utama masyarakat terdampak yang memerlukan pemecahan masalah. Akar masalah yang diidentifikasi yaitu “Menurunnya perekonomian masyarakat sekitar (nelayan, buruh angkut, petani tambak, penjual pisang epe, pelaku UMKM) di sekitar pembangunan CPI, sehingga meningkatkan kesenjangan sosial”.

b. Tujuan dan Sasaran Rencana Sosial

Dari akar masalah utama tersebut, dirumuskan tujuan untuk mengatasi akar masalah yaitu “Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pembangunan CPI”. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai adalah “Meningkatnya daya beli masyarakat yang terdampak (nelayan, petani tambak, buruh, dsb)”. Sehingga tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai pedoman perencanaan sosial yang akan dilaksanakan.

c. Arah Kebijakan Rencana Sosial

Arah kebijakan difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut. Arah kebijakan difokuskan untuk kelompok sasaran penerima manfaat yaitu masyarakat terdampak (nelayan, buruh angkut, petani tambak, penjual pisang epe, pelaku UMKM) dan ibu-ibu rumah tangga yang juga terdampak dari pembangunan CPI. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:

d. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Terdampak

Pembangunan CPI berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat pesisir karena hilangnya mata pencaharian dan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu diambil kebijakan untuk meningkatkan kembali pendapatan masyarakat yang terdampak dari pembangunan CPI tersebut

e. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terdampak

Masyarakat terdampak yang bekerja sebagai nelayan, buruh angkut, petani tambak, dll memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang hanya bergelut di bidang tersebut sehingga tidak memiliki keahlian di bidang pekerjaan lain. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat agar masyarakat bisa memiliki lebih banyak skill dan keterampilan lebih baik sehingga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di sektor lain dan dapat diberdayakan di dalam pembangunan CPI

f. Pemenuhan Hak-Hak Dasar masyarakat terdampak (Pangan, Sandang, Papan)

Menurunnya pendapatan masyarakat menjadikan kualitas hidup masyarakat juga menurun. Masyarakat pesisir terdampak umumnya memiliki banyak jumlah tanggungan dalam keluarga, semakin banyak pula kebutuhan keluarga yang dipenuhi utamanya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Maka perlu adanya kebijakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak (pangan, sandang, papan) dalam rangka pemenuhan kebutuhan utama tersebut

g. Pemberdayaan masyarakat terdampak

Sebagai bentuk kompensasi sosial bagi masyarakat terdampak pembangunan CPI maka perlu tersedianya lapangan pekerjaan baru. Pembangunan CPI bisa menyediakan peluang kerja baru pada masyarakat yang telah kehilangan pekerjaan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat terdampak agar masyarakat terdampak bisa ikut bekerja dalam pembangunan CPI selama pembangunan berlangsung dan adanya jaminan jangka

panjang kepada masyarakat berupa bantuan modal usaha dan fasilitas agar mereka bisa membuka usaha baru di Kawasan CPI tersebut

h. Penguatan Jaringan Industri Kreatif Rumahan

Ibu-Ibu rumah tangga sebagai kelompok sasaran terdampak pembangunan CPI yang sebelumnya memiliki pendapatan tambahan dengan membantu pengolahan hasil tangkapan nelayan, maupun berjualan disekitar pantai juga mengalami penurunan pendapatan. Sehingga perlu adanya, kebijakan penguatan jaringan industri kreatif rumahan untuk membantu para ibu -ibu rumah tangga membuka usaha kreatif rumah tangga guna menopang ekonomi keluarga

i. Kelompok Penerima Manfaat Rencana Sosial

Arah kebijakan rencana sosial yang dirumuskan untuk kelompok penerima manfaat Masyarakat Pesisir terdampak seperti nelayan, buruh angkut, petani tambak, penjual pisang epe, pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Perubahan yang terjadi selama rentan waktu proses pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) adalah dampak positif pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) yang dirasakan beberapa pihak seperti para pengusaha bisnis dan hiburan dalam mengekspansi bisnisnya, pemerintah daerah pada peningkatan PAD, masyarakat umum dengan perluasan lapangan kerja serta untuk menarik para investor.

Dampak negatif pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) pada perekonomian masyarakat pesisir sekitar yang berprofesi sebagai nelayan, petani tambak, buruh angkut serta pelaku UMKM, namun yang paling signifikan merasakan dampaknya adalah hasil tangkapan nelayan karena keragaman tangkapan berkurang berimplikasi terhadap penurunan jumlah rata- rata pendapatan nelayan, terjadinya pendangkalan dan akses yang sempit yang juga berimplikasi terhadap penambahan jumlah rata-rata untuk pengeluaran nelayan per trip, adanya kesenjangan disparitas antara pengunjung CPI dengan nelayan dan menurunnya kualitas hidup (sandang, pangan papan) nelayan.

Solusi untuk mengatasi dampak negatif pada perekonomian masyarakat pesisir secara umum adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak (nelayan, petani tambak, buruh, dsb), Adapun arah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak, Peningkatan kapasitas masyarakat terdampak, Pemenuhan hak – hak dasar masyarakat terdampak (pangan, sandang, papan), Pemberdayaan masyarakat terdampak dan Penguatan jaringan Industri Kreatif Rumahan.

Penentu kebijakan seyogyanya memahami bahwa Kota Makassar bukan hanya milik masyarakat tertentu, ada masyarakat kecil hidup hanya dari penghasilan tangkap ikan, kehidupan mereka bergantung disana.

Pemerintah Kota Makassar seyogyanya tetap memperhatikan keselamatan masyarakat terdampak akibat pembangunan yang digarap khususnya pembangunan jembatan utama CPI. Seharusnya jarak penyangga jembatan CPI didesain sedemikian rupa agar tidak merugikan nelayan yang beraktivitas di bawah jembatan. Untuk itu perlu adanya dukungan dari pemerintah dan pihak swasta terhadap peningkatan penyiapan dan persediaan modal kerja serta pendistribusian bantuan berupa alat tangkap dan bahan bakar untuk transportasi nelayan.

REFERENSI

- Amiruddin, Afni. 2017, Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Reklamasi Pantai di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1):1-9
- Attahmid, Andi Nur Achsanuddin Usdyn. 2018, Pengaruh Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) Terhadap Perekonomian Masyarakat Pesisir di Kecamatan Mariso Kota Makassar. *Jurnal Economic Resources*, 1(1):60-70.
- Amaliyah, Suhairah. 2020, Dampak Pembangunan Center Point of Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Panambungan. Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi (UIN) Alauddin Makassar.
- Aspan, Zulkifli. 2017, Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar dalam Mega Proyek Centre Point of Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, Bina Hukum Lingkungan, 1(2):172-189.
- Badan Pusat Statistik. 2021, Berita Resmi Statistik 2021. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Fuadi, Nurul, Mone, Nurdin dan Suhur, Fadhil. 2021, Dampak Pengembangan Center Point of Indonesia (CPI) Terhadap Potensi Pencemaran Limbah di Sekitar Pantai Losari. *Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiah*, 1(1):1-15
- Jaya, Akhiruddin Marrung. 2012, Kajian Kondisi Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Reklamasi Pantai Losari dan Tanjung Bunga. Tesis Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Jumadi, Novrian Yosua Timang, Taufiqur Rachman dan Chairul Paotonan. 2019, Analisa Kesadaran Masyarakat tentang Dampak Sampah Terhadap Pencemaran Pantai Losari. Seminar Sains dan Teknologi Kelautan, Gedung CSA Kampus Fakultas Teknik UNHAS Gowa 1 Oktober 2019.
- Ruslin, Ismah Tita. 2017, Subaltern dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2):185-199
- Wulandari, Andi Sri Rezky dan Makkah.H. 2019, Tinjauan Yuridis Reklamasi Pantai dan Implikasinya di Anjungan Pantai Losari Makassar. *Petitum*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur.